

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 13 JANUARI – 29 MARET 2020
(Masa Sidang Mulai Tanggal 13 Januari – 27 Februari 2020
dan Masa Reses Mulai Tanggal 28 Februari – 29 Maret 2020)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 58 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019 telah menetapkan 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU dan dan 5 (lima) RUU Kumulatif terbuka sebagai Prolegnas Tahun 2020-2024. Dari daftar Prolegnas tersebut, berdasarkan klasifikasi, terdapat 21 (dua puluh satu) RUU yang terkait dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, yaitu:

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/DPD
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAH
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH
21.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	PEMERINTAH

Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Januari 2020 telah mengesahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Dari daftar tersebut, yang merupakan RUU Prioritas Komisi I DPR Tahun 2020, yaitu:

1. **RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Prioritas Tahun 2020**
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - b. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. **RUU Usul Inisiatif Pemerintah Prioritas Tahun 2020**
 - a. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
 - b. RUU tentang Keamanan Laut

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI telah melaksanakan perumusan/pembahasan terhadap:

1. **RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Prioritas Tahun 2020**
 - a. **RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, selanjutnya disebut dengan RUU Penyiaran**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 14 Januari 2020 telah memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Perumusan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR RI (**selanjutnya disebut Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI**) dan menugaskan Panja untuk melaksanakan perumusan terhadap RUU Penyiaran dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Intern Komisi I DPR RI.

Selanjutnya, proses perumusan terhadap RUU tentang Penyiaran mulai dilaksanakan, yaitu dengan:

- 2) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan:
 - a) Pakar/ Akademisi (Dr. Lestari Nurhayati, M.Si., Dr. Firman Kurniawan, M.Si., Ir. Nonot Harsono, dan Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.) pada tanggal 22 Januari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran.
 - b) Pejabat Pemerintah (Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Pejabat LPP RRI (Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI), dan Pejabat LPP TVRI (Pit. Dirut LPP TVRI) pada tanggal 28 Januari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran, yaitu mengenai:
 - i. Pengaturan Penyiaran di Era Digital;
 - ii. Penguatan dan Pengelolaan Frekuensi di Era Penyiaran Digital
 - c) Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Asosiasi Televisi Digital Siaran Indonesia (ATDSI), dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) pada tanggal 29 Januari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran, yaitu mengenai:
 - i. Pengaturan Lembaga Penyiaran di Era Penyiaran Digital;
 - ii. Pengaturan Program Siaran di Era Penyiaran Digital.
 - d) Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI) pada tanggal 12 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran, yaitu mengenai:
 - i. Pengaturan materi isi siaran di Era Penyiaran Digital;
 - ii. Pengaturan Kerja sama Multipleksing di Era Penyiaran Digital.
 - e) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) pada tanggal 24 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran, yaitu mengenai:
 - i. Pengaturan materi isi siaran secara komprehensif;
 - ii. Pengaturan iklan (komersial, layanan masyarakat, politik);
 - iii. Permasalahan materi isi siaran dan iklan masyarakat.

- 3) melaksanakan Kunker Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Jawa Tengah (Semarang) dan Jawa Timur (Surabaya) dalam rangka mendapatkan masukan dari LPP RRI dan LPP TVRI mengenai peran dan fungsi LPP di era penyiaran pada tanggal 13-15 Februari 2020.

b. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 belum melaksanakan proses perumusan terhadap RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

2. RUU Usul Inisiatif Pemerintah Prioritas Tahun 2020

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

- a. Presiden melalui Surat Nomor: R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah menyampaikan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI dan telah menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR RI.
- b. Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 – 2020 tanggal 3 Februari 2020 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.
- c. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 10 Februari 2020 memutuskan untuk segera membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.
- d. Selanjutnya Komisi I DPR RI telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi kepada Fraksi-Fraksi agar dapat dipersiapkan DIM Sandingan Fraksi-Fraksi.
- e. Komisi I DPR RI pada tanggal 25 Februari 2020 telah Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri dan Menkumham) dengan agenda Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
- f. Komisi I DPR RI akan melanjutkan proses pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraina on Cooperation in the Field of Defence*)

- a. Presiden melalui Surat Nomor: R-01/Pres/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan bersama-sama dengan DPR RI.
- b. Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 21 Januari 2020 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah.
- c. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 29 Januari 2020 memutuskan untuk segera membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah.
- d. Dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi, yaitu Kusnanto Anggoro, Ph.D., Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D., dan Brigjen Dr (Rer). Pol. Rodon Pedrason, M.A. pada tanggal 18 Februari 2020.
- e. Komisi I DPR RI akan melanjutkan proses pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI tidak melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

A. RAKER/RDP/RDPU DENGAN MITRA KERJA KOMISI I DPR RI

1. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI (menghadirkan Kepala Staf Angkatan), dan RDP dengan Kepala Bakamla tanggal 20 Januari 2020 dalam rangka membahas isu Natuna, pengembangan kekuatan TNI dan kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah perairan Natuna dalam rapat bersifat tertutup.
2. Rapat dengan LPP TVRI terkait dengan permasalahan pemberhentian Dirut LPP TVRI, yaitu:
 - a. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI tanggal 21 Januari 2020 dalam rangka membahas progres penyelesaian masalah Pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Dewas LPP TVRI terkait langkah 4 Anggota Dewas LPP TVRI memberhentikan Direktur Utama LPP TVRI dan juga mendengarkan 1 Anggota Dewas yang memiliki pendapat berbeda (Dissenting opinion). Selanjutnya Komisi I DPR RI akan melakukan pendalaman atas berbagai alasan pemberhentian tersebut dengan berbagai pihak yang terkait.
 - 2) Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Direksi LPP TVRI sebagai upaya mendapatkan informasi yang berimbang dan komprehensif.
 - 3) Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak mengganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.

- b. RDP Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI tanggal 27 Januari 2020 terkait dengan penyelesaian masalah Pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI, dengan kesimpulan bahwa:

“Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Dewan Direksi LPP TVRI terkait permasalahan pemberhentian sdr. Helmy Yahya selaku Direktur Utama LPP TVRI periode 2017-2022. Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan berbagai pihak terkait.”
 - c. RDPU Komisi I DPR RI dengan Saudara Helmy Yahya, MPA., Ak. CPMA, CA. tanggal 28 Januari 2020 terkait dengan permasalahan pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI, dengan catatan bahwa:
 - 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Saudara Helmy Yahya terkait pemberhentian Saudara Helmy Yahya sebagai Direktur Utama LPP TVRI periode 2017-2022 oleh Dewan Pengawas LPP TVRI. Selanjutnya, penjelasan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR RI terkait permasalahan tersebut.
 - 2) Komisi I DPR RI akan melaksanakan rapat internal untuk membahas terkait usulan rencana audit investigasi (audit tujuan tertentu) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LPP TVRI.
 - d. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 25 Februari 2020 dalam rangka penyampaian Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI, dengan kesimpulan bahwa:
 - 1) Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas LPP TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.
 - 2) Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas LPP TVRI untuk membahas alokasi anggaran dan proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.
 - 3) Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas solusi anggaran LPP TVRI untuk mewujudkan realisasi tunjangan kinerja karyawan LPP TVRI.
3. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri terkait dengan permohonan pendapat terhadap pengiriman 1 (satu) SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan ke Negara Australia pada tanggal 30 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa:
- 1) Komisi I DPR RI memberikan pendapat dan menyetujui permintaan Pemerintah untuk mengirimkan 1 (Satu) SST Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan ke Negara Australia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk pemenuhan realisasi anggaran kontinjensi TNI dalam misi kemanusiaan sebagaimana point 1 (satu) tersebut di atas.
4. Raker Gabungan antara Komisi X, Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPR RI dengan Menpora, Mendagri, BIN, Panglima TNI, dan Kapolri pada tanggal 4 Februari 2020 dalam rangka membahas situasi keamanan dan pertahanan terkait kesiapan PON XX di Papua, dalam Rapat bersifat tertutup.
5. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 5 Februari 2020 terkait dengan:
 - a. *progres report* pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria);
 - b. *progres report* target Indonesia Merdeka Sinyal 2020;
 - c. pengaturan kebijakan dan pengawasan layanan Over the Top;
 - d. perkembangan dan pemetaan perijinan televisi berbasis digital;
 - e. isu-isu aktual lainnya.Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan Program “Indonesia Merdeka Sinyal” sebagai upaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan didukung anggaran yang memadai dan sesuai dengan target waktu yang direncanakan.
 - 2) Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika agar program pengadaan Satelit Multi Fungsi (Satelit Republik Indonesia) dapat terealisasi dengan baik sebagaimana target yang telah ditetapkan termasuk kesiapan dukungan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta transparan dan akuntabel.
 - 3) Sejalan dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Komisi I DPR RI terkait dengan program pelatihan Digital Talent Scholarship beserta alokasi anggarannya dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia Digital Indonesia.
 - 4) Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan operator seluler untuk membahas sinergitas program pembangunan infrastruktur telekomunikasi
6. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen Negara pada tanggal 12 Februari 2020 terkait dengan:
 - a. Evaluasi Kinerja BIN Tahun 2019;

- b. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Program Kerja/Pelaksanaan APBN BIN Tahun 2020;
 - c. Pembahasan isu-isu aktual, terkait :
 - 1) Pilkada serentak tahun 2020;
 - 2) Penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua;
 - 3) Separatisme, terorisme, dan radikalisme;
 - 4) Isu strategis di bidang intelijen lainnya.
 dalam Rapat bersifat tertutup
7. RDP Komisi I DPR RI dengan KPI pada tanggal 17 Februari 2020 terkait dengan:
- a. Progres revisi P3SPS;
 - b. Pantauan KPI terhadap penyiaran berbasis Digital di daerah perbatasan;
 - c. Peran dan strategi KPI terkait pengawasan media baru;
 - d. Progres pengawasan KPI terkait isi siaran.
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Komisi I DPR RI mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk segera menuntaskan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disesuaikan dengan dinamika dunia penyiaran dan segera menyampaikan draft tersebut kepada Komisi I DPR RI.
 - 2) Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan KPI Pusat tentang materi muatan substansi pengaturan media baru berbasis online sehingga ke depan, hal tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-undang.
 - 3) Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan KPI Daerah terkait pengawasan isi siaran sehingga Lembaga Penyiaran menayangkan program siaran yang informatif, mendidik, dan tidak menayangkan konten negatif yang melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS.
 - 4) Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk mengawasi isi siaran di wilayah perbatasan sehingga masyarakat setempat mendapatkan tayangan siaran nasional maupun lokal yang mampu menjaga nasionalisme dan integritas bangsa.
8. RDP Komisi I DPR RI dengan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tanggal 19 Februari 2020 dalam rangka membahas kesiapan Kostrad TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok TNI dengan dukungan alutsista beserta sarana dan prasarana, dalam Rapat bersifat tertutup.
9. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan pada tanggal 26 Februari 2020 terkait dengan permohonan persetujuan penerimaan hibah *Scan Eagle UAV* dan

Program *Bell 412 Helicopter Equipment* dari Pemerintah Amerika Serikat untuk TNI AL, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI menyetujui Program *Foreign Military Financing* (FMF) penerimaan hibah 14 unit *Scan Eagle Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan 3 unit Program *Bell 412 Helicopter Equipment* dari Pemerintah Amerika Serikat untuk TNI AL.
- 2) Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan kerahasiaan (*security*), serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

B. PERTIMBANGAN CALON ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) PERIODE 2019-2023

1. Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF menyatakan bahwa:
 - a. **Presiden mengangkat 17 (tujuh belas) anggota LSF setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.**
 - b. **Yang dimaksud berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketentuan ini bukan merupakan uji kelayakan dan kepatutan.**

Untuk itu, Presiden RI melalui surat Nomor: R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Calon Anggota LSF Periode 2019-2023, telah menyampaikan 34 Calon Anggota LSF kepada DPR RI untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR RI.

2. Rapat Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 tanggal 16 Desember 2019 memutuskan menyetujui Pembahasan terhadap Calon Anggota LSF Periode 2019-2023 diserahkan kepada Komisi I DPR RI.
3. Menindaklanjuti penugasan Rapat Bamus tersebut di atas, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 14 Januari 2020 memutuskan untuk segera melaksanakan pemberian pertimbangan terhadap Calon Anggota LSF Periode 2019-2023.
4. Untuk itu, pada tanggal 27 Januari 2020, Komisi I DPR RI terlebih dahulu melaksanakan RDP dengan Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. beserta Panitia Seleksi Calon Anggota LSF dalam rangka membahas:
 - a. Penjelasan Kemendikbud R.I. terkait kronologis pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota LSF periode 2019 – 2023;
 - b. Penjelasan Panitia Seleksi terkait seleksi Calon Anggota LSF Periode 2019-2023

dalam Rapat bersifat tertutup.

5. Selanjutnya, Komisi I DPR RI pada tanggal 10-11 Februari 2020 telah melaksanakan RDPU dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 dalam rangka mendengarkan penyampaian visi dan misi oleh 34 (tiga puluh empat) Calon Anggota LSF Periode 2019-2024 dalam Rapat bersifat tertutup.
6. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 11 Februari 2020 telah memberikan pertimbangan terhadap Calon Anggota LSF Periode 2019-2023.
7. Komisi I DPR RI telah menyampaikan hasil pertimbangan terhadap Calon Anggota LSF Periode 2019-2023 kepada Presiden melalui Pimpinan DPR RI.

C. PANJA PENGAWASAN

Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 24 Februari 2020 memutuskan membentuk:

1. Panja Kesejahteraan Prajurit
2. Panja Ketahanan Nasional untuk mengatasi Dampak Virus Corona

Kedua Panja tersebut di atas, akan mulai menyusun program kerjanya pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

D. KUNJUNGAN KERJA

1. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- a. Kepulauan Riau (Natuna) tanggal 16-18 Januari 2020 dalam rangka mengetahui kesiapan satuan terpadu TNI dalam mengamankan wilayah perairan Natuna.
- b. Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat tanggal 23-25 Januari 2020 dalam rangka mengetahui penyediaan infrastruktur telekomunikasi (*Base Transceiver Station* (BTS), Akses Internet, dan Palapa Ring) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
- c. Kepulauan Riau (Tanjungpinang) tanggal 20-22 Februari 2020 dalam rangka mengetahui kesiapan jajaran TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan.

- d. Kepulauan Riau (Batam) tanggal 20-22 Februari 2020 dalam rangka mengetahui kesiapan dalam mengamankan wilayah perbatasan dan pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020.

2. KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

Sehubungan dengan penyebaran virus Corona yang telah mencapai beberapa negara, maka pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI memutuskan untuk tidak mengadakan Kunjungan Kerja Luar Negeri.

3. KUNJUNGAN KERJA RESES

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, yaitu pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 2020, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- a. Sumatera Utara;
- b. Sulawesi Selatan
- c. Kalimantan Selatan

E. PERTEMUAN DENGAN DUBES/DELEGASI NEGARA SAHABAT ATAU KUNJUNGAN DARI DELEGASI NEGARA SAHABAT/ KUNJUNGAN DARI LEMBAGA LAINNYA

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI juga telah melaksanakan pertemuan dengan Dubes/Delegasi Negara Sahabat atau menerima kunjungan dari Delegasi Negara Sahabat atau kunjungan dari Lembaga lainnya, yaitu:

1. Courtesy Call Dubes Australia untuk Indonesia
2. Courtesy Call Dubes Azerbaijan untuk Indonesia
3. Pertemuan Komisi I DPR RI dengan Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Norwegia
4. Pertemuan Komisi I DPR RI dengan Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Hungaria
5. Courtesy Call Dubes New Zealand untuk Indonesia
6. Courtesy Call Dubes Kanada untuk Indonesia
7. Courtesy Call Dubes Pakistan untuk Indonesia
8. Courtesy Call Dubes Armenia untuk Indonesia
9. Courtesy Call Dubes Swiss untuk Indonesia
10. Kunjungan Tim Walikota Ambon
11. Kunjungan Panitia Isra' Mi'raj Bela Al Aqsa

F. PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP DUBES NEGARA-NEGARA SAHABAT UNTUK INDONESIA

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Pimpinan Komisi I DPR RI atau yang mewakili ikut dalam pemberian pertimbangan terhadap Dubes Negara-Negara Sahabat untuk Indonesia.

G. PIMPINAN/ANGGOTA KOMISI I DPR RI MENDAMPINGI PIMPINAN DPR MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI NEGARA SAHABAT

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Pimpinan atau beberapa orang Anggota Komisi I DPR RI ikut mendampingi Pimpinan DPR RI dalam menerima Kunjungan Delegasi dari Negara-Negara Sahabat.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 – 2020.

Jakarta, 13 Maret 2020
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001